

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN APLIKASI SAKTI PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA KENDARI**Wardatun Mukaromah¹, Erwin Hadisantoso², Fitriaman³**¹²³Universitas Halu Oleowardatunmukarromah@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan melalui penggunaan aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait dalam proses pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SAKTI telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu mendukung proses penyusunan laporan keuangan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Selain itu, penggunaan sistem ini juga membantu meningkatkan ketepatan waktu pelaporan serta kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, keterlambatan pengumpulan dokumen pendukung, serta gangguan teknis pada sistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan sistem agar implementasi SAKTI dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Laporan Keuangan, SAKTI, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Abstract

This study aims to analyze the analysis of the application of accounting information systems in the preparation of financial statements through the use of the SAKTI application at the General Election Commission (KPU) Office of Kendari City. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, where data is obtained through interview, observation, and documentation techniques for related parties in the financial management process. The results of the study show that the implementation of the SAKTI application has been carried out in accordance with applicable provisions and is able to support the process of preparing financial statements more effectively, efficiently, and integrated. In addition, the use of this system also helps to improve the timeliness of reporting and the quality of the financial information produced. However, in its implementation, there are several obstacles, such as limited human resource competence, delays in collecting supporting documents, and technical problems in the system. Therefore, efforts are needed to increase human resource capacity and optimize system utilization so that the implementation of SAKTI can run more optimally and sustainably in supporting transparency and accountability in financial management.

Keyword: Accounting Information System, Financial Statements, SAKTI, Government Regulation Number 71 of 2010.

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author**Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Di era modern, perkembangan sistem informasi dan kemajuan teknologi terjadi sangat cepat dan mempengaruhi berbagai bidang, mulai dari bisnis hingga organisasi, baik perusahaan besar maupun kecil. Karena itu, setiap organisasi memerlukan sistem informasi yang baik, terutama sistem informasi akuntansi yang berkualitas agar dapat menghasilkan informasi yang berguna dan tidak menyulitkan pengguna (Hilmawan, 2012). Sistem informasi merupakan hal penting bagi perusahaan atau organisasi untuk mengetahui faktor yang menentukan keberhasilannya, yaitu kepuasan pengguna (Subiyakto, A., Suryadi, K., & Handayani, 2016). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat telah menjadi salah satu faktor pendorong dan memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian dunia. Keberadaan teknologi yang semakin canggih memungkinkan pengguna untuk melakukan pemanfaatan teknologi tepat guna. Salah satunya dengan membangun sistem informasi akuntansi (Zahara & Firdaus, 2025). Perkembangan sistem informasi yang diiringi reformasi sektor publik saat ini sangat dinamis dan tidak dapat dipisahkan dari tuntutan masyarakat untuk memahami secara kritis baik dan buruknya kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Populasi tidak hanya mencakup orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekadar jumlah atau perusahaan, tetapi bertujuan untuk memperlancar operasional kerja. Berkembangnya teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjadwalkan aktivitas manusia, baik dalam dunia sosial maupun dunia kerja (Handayani, 2012).

Berkembangnya teknologi komputer dan informasi, sistem informasi akuntansi tradisional kini berubah menjadi sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Sistem ini memungkinkan pengguna laporan keuangan melihat laporan kapan saja dan menyajikan informasi keuangan dengan lebih cepat serta lebih akurat. Informasi keuangan ini sangat penting bagi perusahaan atau lembaga dalam melakukan analisis, membandingkan data dengan laporan keuangan di masa lalu. Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta perubahan kondisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi banyak pengguna dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat atau periode tertentu (Kasmir, 2013). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Penyusunan laporan keuangan, diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang memadai agar mampu memberikan laporan keuangan yang reliabel dan relevan. Sistem informasi akuntansi memiliki peran penting mulai dari proses pencatatan transaksi hingga memperoleh informasi yang berkualitas. Menurut (Arum et al., 2017), sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang memiliki peranan penting bagi suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan selain dibutuhkan untuk pengolahan data, sistem informasi akuntansi mampu menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengambilan keputusan. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor KPU Kota Kendari. Disamping itu, laporan keuangan ini juga

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, 2021).

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas utama KPU adalah mengatur dan melaksanakan seluruh tahapan proses pemilihan umum, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, sampai tahapan pelaksanaan dan pengawasan hasil pemilihan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU bertanggung jawab untuk memastikan pemilihan umum dilaksanakan secara adil, jujur, dan demokratis, serta memastikan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih terjamin. KPU juga harus melindungi hak-hak pemilih dan menjamin keamanan, keterbukaan, dan integritas proses pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari adalah salah satu entitas pelaporan yang berada di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tingkat daerah, lembaga pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari memainkan peran penting dalam mengurus urusan pemerintahan terkait pemilu, yang mencakup merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan anggaran secara jujur dan bertanggung jawab. Sebagai lembaga yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), KPU Kota Kendari wajib mengelola keuangan berdasarkan prinsip jujur, transparan, dan efisien, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dari hasil wawancara pra penelitian dengan bendahara dan staf bagian keuangan serta operator sistem KPU Kota Kendari menunjukkan adanya beberapa masalah dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Misalnya, terdapat perubahan penggunaan aplikasi dalam beberapa tahun terakhir, yang awalnya dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan beberapa aplikasi untuk membuat laporan keuangan (Aplikasi RKA-KL, Aplikasi Gaji, Aplikasi SAS, Aplikasi Persediaan, Aplikasi BMN, Aplikasi SAIBA, dan Aplikasi E-Rekon LK). Untuk saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari menggunakan satu aplikasi yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, KPU Kota Kendari memiliki bagian keuangan yang bertugas mengelola dana hibah serta dana operasional penyelenggaraan pemilu, seperti kegiatan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, hingga kebutuhan logistik pemilu. Pengelolaan anggaran di KPU Kota Kendari dilakukan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang berfungsi sebagai bagian dari Sistem Informasi Akuntansi pemerintah. Melalui SAKTI, proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi dan terdokumentasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

Kendala jaringan dan server yang sering terjadi juga menghambat proses input data transaksi keuangan dan pelaporan, sehingga berpengaruh pada ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengiriman laporan keuangan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU RI. Masalah lain yang ditemukan adalah kurangnya tenaga teknis yang terampil di bidang teknologi informasi dan akuntansi pemerintahan, sehingga beban kerja administratif menjadi tidak efisien. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian (Nasution et al., 2024) yang menganalisis efektivitas pembuatan laporan keuangan menggunakan aplikasi SAKTI di Kementerian Agama Kota Binjai, terlihat

bahwa penerapan SAKTI sudah cukup efektif. Namun, masih ada beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman pegawai dan kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan serta kualitas jaringan internet. Penelitian tersebut hanya fokus pada efektivitas pembuatan laporan keuangan, tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana sistem informasi akuntansi terintegrasi melalui SAKTI mempengaruhi kualitas laporan keuangan di organisasi pemerintah lainnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rahman et al., 2023) di KPPN Semarang I menunjukkan bahwa penggunaan SAKTI sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan negara karena menggabungkan berbagai modul seperti penganggaran, komitmen, pembayaran, aset, dan pelaporan. Namun, penelitian ini lebih fokus pada penerapan teknis dan dukungan sistem, tanpa mengevaluasi sejauh mana sistem informasi akuntansi yang dibangun melalui SAKTI mampu memberikan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya di tingkat instansi tertentu. Dua penelitian tersebut juga berfokus pada lembaga yang berbeda dengan karakteristik dalam pengelolaan keuangannya, seperti Kemenag dan KPPN. Belum ada penelitian yang meninjau bagaimana SAKTI digunakan dalam konteks lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU, yang memiliki struktur anggaran khusus, jadwal kegiatan yang cepat dan berubah-ubah, serta siklus pelaporan yang ketat dan berbeda dari lembaga lainnya. Selain itu, belum juga diteliti bagaimana kualitas sistem informasi akuntansi, kemampuan SDM, dan modul SAKTI berperan langsung dalam penyusunan laporan keuangan di KPU sebagai lembaga pelaporan pemerintah.

Penelitian ini perlu dilakukan agar dapat mengisi celah informasi tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara sistem informasi akuntansi yang dioperasikan melalui aplikasi SAKTI mendukung penyusunan laporan keuangan di KPU Kota Kendari, baik dari segi teknis, sumber daya manusia, maupun kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Sistem informasi akuntansi memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sistem ini mampu menggabungkan data keuangan dengan cepat, tepat, dan secara langsung. Menurut (Lestari et al., 2023), penerapan sistem informasi akuntansi yang baik akan meningkatkan efektivitas penyusunan laporan keuangan karena mempercepat proses pelaporan, meningkatkan akurasi data, serta mengurangi kesalahan pencatatan. Hal ini sangat relevan dengan kondisi KPU Kota Kendari yang membutuhkan sistem akuntansi yang handal untuk memastikan penggunaan dana pemilu bisa dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas publik. Situasi yang terjadi di KPU Kota Kendari menunjukkan bahwa meskipun penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) telah membantu meningkatkan transparansi dan keakuratan dalam laporan keuangan, masih ada kendala teknis dan keterbatasan dari sumber daya manusianya yang mempengaruhi efektivitas penyusunan laporan tersebut. Karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis peran sistem informasi akuntansi yang digunakan di KPU Kota Kendari dalam proses penyusunan laporan keuangan, serta seberapa besar sistem tersebut mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam menyusun pelaporan keuangan dengan aplikasi SAKTI pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Menurut (Mulyani et al., 2019), sistem adalah gabungan dari beberapa subsistem, komponen, atau bagian-bagian yang bekerjasama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut (Mulyadi, 2016), sistem adalah kelompok unsur yang saling terkait erat dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (Puspitawati et al., 2014), informasi adalah data yang sudah diubah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih bermakna bagi orang yang menerima. Menurut (Romney, 2015), informasi adalah data yang sudah diproses dan diatur agar bisa memberikan makna serta membantu

dalam mengambil keputusan. Akuntansi adalah suatu sistem, bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir merupakan masukan bagi sistem akuntansi, sementara keuangannya berupa laporan keuangan. Dalam rangkaian proses akuntansi, beberapa catatan penting disusun antara lain jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2017), Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. SIA dapat berupa sistem manual maupun sistem kompleks yang menggunakan teknologi informasi terbaru. Apapun pendekatan yang digunakan, prosesnya masih sama karena manual atau teknologi informasi hanyalah alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi (TMBooks, 2017).

Akuntansi Pemerintahan dalam sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintahan pusat, maupun pemerintah daerah. Penerapan mekanisme akuntansi pada organisasi pemerintahan bukan berarti bahwa akuntansi organisasi komersial sepenuhnya diterapkan pada organisasi pemerintah. Karena perbedaan sifat, tujuan, lingkungan, dan standar akuntansi, maka penerapan pada organisasi pemerintahan berbeda dibandingkan dengan penerapan akuntansi pada organisasi (Majid, 2019). Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar ini maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar ini merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan keuangan adalah informasi akuntansi berupa laporan terstruktur yang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi tentang informasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pengguna atau pemangku kepentingan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen (Zaimar, 2024). Laporan keuangan di instansi pemerintahan adalah bentuk resmi untuk menunjukkan bagaimana sumber daya ekonomi dan keuangan publik dikelola oleh pemerintah, agar dapat memenuhi tujuan negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan dibuat agar memberikan informasi tentang kondisi keuangan, pelaksanaan anggaran, aliran dana, serta hasil keuangan yang bermanfaat bagi pihak yang memakai laporan untuk menilai tanggung jawab dan membuat keputusan dalam hal ekonomi, sosial, atau politik (Majid, 2019). Menurut (Halim, 2018), tujuan utama penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai asal, penyaluran, dan penggunaan dana yang dikelola oleh pemerintah. Laporan keuangan ini juga digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangan, efisiensi pengelolaan anggaran, serta kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan berfungsi sebagai alat pengawasan internal dan eksternal oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut (Suwanda, 2020), Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan dan perundang-undangan.

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan kementerian Negara / Lembaga. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI terdiri atas SAKTI Online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem *single entry point*, single database, dan akuntansi berbasis akrual. adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *Unaudited*, dan audit (Nasution et al., 2024). SAKTI merupakan bentuk reformasi birokrasi di bidang keuangan yang mempermudah pengelolaan keuangan negara karena mengintegrasikan semua aplikasi satker yang sebelumnya berdiri sendiri menjadi satu database lengkap dan memiliki keamanan terjaga, baik keamanan data maupun sistem. SAKTI juga membawa satuan kerja menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, terstruktur, transparan, dan akuntabel sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan perbaikan dan modernisasi di bidang penganggaran dan perbendaharaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di instansi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari yang berlokasi di jalan Chairil Anwar No. 10, Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dengan aplikasi SAKTI. Dalam penelitian ini narasumber atau informan yang paling mengetahui mengenai Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menyusun Pelaporan Keuangan Dengan Aplikasi SAKTI Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari yang berjumlah 4 orang, diantaranya Sekretaris KPU Kota Kendari, Kassubag Keuangan Umum dan Logistik (KUL), Bendahara Keuangan, dan Operator Sistem. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muskam selaku sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari pada senin 26 januari 2026 pukul 15.00 WITA dan bapak Muhammad Rajab Buruto selaku operator sistem, bapak Ichwansyah selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, serta ibu Nelni selaku Bendahara Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari pada 28 januari 2026 pukul 15.30 WITA mengenai Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari. Semua data hasil dari penelitian ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi di KPU Kota Kendari diimplementasikan secara terkomputerisasi dan terintegrasi melalui aplikasi resmi pemerintah. Hasil ini memudahkan proses pencatatan transaksi karena setiap kegiatan keuangan dicatat secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, risiko kesalahan

pencatatan dan duplikasi data dapat diminimalkan, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal. Pada saat ini KPU Kota Kendari dalam menerapkan sistem informasi akuntansi dengan prosedur yang sudah terkomputerisasi yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari menjalankan sistem tersebut untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, yaitu begitu seringnya terjadi perubahan mengenai sistem aplikasi, perubahan sistem aplikasi tersebut pada awalnya mengakibatkan para pegawai keuangan dan operator sistem terkhusus di kantor KPU Kota Kendari mengalami kesulitan dengan aplikasi yang mengalami perubahan sehingga aplikasi tersebut harus dipelajari terus menerus, dan harus memahami sendiri (otodidak) sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian *stakeholder* pengambil kebijakan. Perkembangan teknologi dan perkembangan pengelolaan sistem yang sesuai dengan seperangkat aturan (regulasi) yang sesuai dengan masa sekarang sangat mempengaruhi kebutuhan *stakeholder* mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengambilan kebijakan. Permasalahan lain yang ada yaitu karena aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis *web (online)*. Prosedur pengoperasiannya adalah dengan menggunakan jaringan internet, jaringan internet tersebut sulit untuk dikendalikan pada kondisi tertentu bisa mengalami gangguan, karena Aplikasi SAKTI berbasis *web* sehingga kondisi jaringan sangat berpengaruh. Seperti gangguan server/down, koneksi internet tidak stabil, kendala pada Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terintegrasi dengan BSR, serta error dalam proses cetak dokumen atau validasi data, terutama saat mendekati batas waktu akhir pembayaran atau penutupan buku.

Kantor KPU Kota Kendari telah memiliki prosedur penanganan tersendiri dalam menghadapi berbagai kendala teknis yang muncul selama penggunaan Aplikasi SAKTI. Berbagai kendala teknis yang dihadapi selama penggunaan SAKTI menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Perubahan sistem yang relatif sering menuntut adanya peningkatan kompetensi pengguna melalui pelatihan dan pendampingan untuk memastikan keberlanjutan agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, peran *stakeholder* sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektifitas penerapan sistem informasi akuntansi pada Kantor KPU Kota Kendari. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pada Kantor KPU Kota Kendari tidak hanya memerlukan dukungan teknologi yang memadai, tetapi juga kebijakan organisasi yang adaptif terhadap perubahan sistem. Adanya sistem informasi akuntansi yang terintegrasi melalui Aplikasi SAKTI sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh KPU Kota Kendari. Informasi keuangan yang tersaji secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik dapat mendukung terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan, seperti keandalan, relevansi, dan ketepatan waktu. Dengan demikian, penerapan sistem informasi akuntansi melalui Aplikasi SAKTI tidak hanya berperan dalam aspek teknis pencatatan, tetapi juga dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan KPU Kota Kendari.

Laporan Keuangan Pemerintah

KPU Kota Kendari menampilkan laporan keuangan melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan cara yang teratur dan terorganisir pada setiap masa laporan. Penyusunan laporan keuangan tersebut bertujuan untuk:

- a. Akuntabilitas: Memberikan jawaban atas pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Manajemen: Memberikan informasi keuangan sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja, merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan di lingkungan KPU.

- c. **Transparansi:** Menyediakan informasi keuangan dengan jelas dan terbuka agar para pihak yang berkepentingan lebih percaya terhadap cara KPU mengelola uangnya.
- d. **Keseimbangan Antargenerasi:** Menunjukkan kemampuan KPU dalam membiayai berbagai kegiatan selama periode yang sedang berlangsung tanpa memberatkan periode berikutnya.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Aplikasi SAKTI pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari harus dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Menteri Keuangan dalam peraturan No.171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti. Aplikasi SAKTI diterapkan untuk menggantikan seluruh aplikasi yang digunakan sebelumnya. Aplikasi SAKTI mampu mengintegrasikan seluruh proses sistem pengelolaan keuangan negara mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan negara yang mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat karena adanya aplikasi SAKTI. Hal ini membuat perubahan yang sempurna dalam pengelolaan keuangan negara. SAKTI memberikan perubahan disisi penggabungan aplikasi eksisting menjadi satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi dalam satu sistem yang didalamnya terdapat berbagai modul. Modul tersebut terdiri dari Modul Penganggaran untuk proses perencanaan dan penganggaran, modul Komitmen, Bendahara, Aset Tetap, Persediaan dan Pembayaran untuk proses pelaksanaan serta modul G/L dan pelaporan untuk proses pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pembahasan

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan dengan Aplikasi SAKTI pada KPU Kota Kendari

Dalam menyelenggarakan akuntansi pemerintahan, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari menjalankan sistem akuntansi keuangan dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penerapan standar tersebut menjadi pedoman utama dalam proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, hingga penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran negara. Dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual tersebut, KPU Kota Kendari menggunakan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan satuan kerja. Aplikasi SAKTI merupakan sistem berbasis *web* yang dirancang untuk membantu satuan kerja pemerintah pusat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara terintegrasi, mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan. Dengan sistem yang terpusat dan saling terhubung antar modul, SAKTI memungkinkan seluruh transaksi keuangan dicatat dalam satu basis data yang sama yang sebelumnya sering terjadi pada sistem berbasis *desktop* yang terpisah-pisah. Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Kendari juga menghadapi beberapa kendala dalam penerapan sistem informasi akuntansi berbasis SAKTI. Salah satu kendala utama adalah perubahan sistem aplikasi yang relatif sering terjadi, baik karena pembaruan versi maupun penyesuaian terhadap regulasi terbaru dari kementerian keuangan. Perubahan tersebut menuntut pegawai, khususnya operator keuangan, untuk terus beradaptasi dengan fitur dan mekanisme kerja yang baru. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua pegawai memiliki latar belakang teknologi informasi yang memadai, sehingga proses pembelajaran sering dilakukan secara mandiri. Kurangnya pelatihan yang sistematis dapat meningkatkan beban kerja pegawai serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penginputan data.

Selain faktor perubahan aplikasi, kendala lain yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi adalah dukungan jaringan internet. Karena SAKTI berbasis *web* dan terhubung langsung dengan sistem pusat, kestabilan jaringan sangat menentukan kelancaran proses pencatatan dan pelaporan. Apabila terjadi gangguan jaringan, maka proses *input* transaksi maupun rekonsiliasi data menjadi terhambat. Oleh karena itu, dukungan teknologi menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi berbasis elektronik di KPU Kota Kendari. Permasalahan lainnya berkaitan dengan proses pengumpulan dan kelengkapan berkas pendukung transaksi. Dalam sistem SAKTI, setiap transaksi keuangan harus didukung oleh dokumen yang lengkap dan sah sebagai dasar pencatatan. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi keterlambatan dalam pengumpulan berkas dari masing-masing bagian atau unit kerja. Salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pengumpulan berkas perjalanan dinas, seperti surat tugas, tiket *boarding pass*, serta bukti pengeluaran lainnya. Keterlambatan ini menyebabkan proses penginputan data tidak dapat dilakukan secara tepat waktu, sehingga berdampak pada keterlambatan pencatatan transaksi dalam sistem.

Meskipun terdapat kendala, secara umum penerapan sistem informasi akuntansi melalui SAKTI di KPU Kota Kendari telah berjalan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. sistem ini telah mampu mendukung penyusunan laporan keuangan yang sistematis dan terstruktur. Namun demikian peningkatan kapasitas sumber daya manusia tetap diperlukan agar pengelolaan keuangan dapat semakin optimal, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin dinamis, serta penerapan yang lebih tertib agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat berjalan secara optimal. Proses pengelolaan keuangan di KPU Kota Kendari melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, penyusunan anggaran (RKA-k/L) yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Setelah DIPA disahkan, proses pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Dalam tahap penatausahaan, setiap transaksi pengeluaran didukung oleh dokumen resmi seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar pencatatan dalam sistem SAKTI. Operator keuangan melakukan input data transaksi ke dalam modul yang tersedia dengan mencantumkan tanggal transaksi, nomor dokumen, uraian kegiatan, nilai transaksi, serta kode akun sesuai Bagan Akun Standar (BAS). Proses ini memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara lengkap dan akurat.

Setelah data diverifikasi, sistem secara otomatis mencatat transaksi dalam jurnal umum menggunakan prinsip *double entry*. Selanjutnya, sistem melakukan posting ke buku besar sehingga saldo masing-masing akun diperbarui secara real time. Proses ini menghasilkan neraca saldo yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap transaksi dapat ditelusuri kembali ke dokumen sumbernya, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tahap akhir dalam sistem informasi akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Seluruh laporan tersebut dihasilkan secara otomatis oleh sistem setelah proses penyesuaian dan tutup buku dilakukan. Penyajian laporan keuangan yang sistematis dan sesuai standar menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi di KPU Kota Kendari telah mendukung karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan melalui Aplikasi SAKTI pada Kantor KPU Kota Kendari telah mampu mendukung proses penyusunan laporan keuangan secara efisien, akurat dan sesuai

dengan regulasi yang berlaku. Integrasi sistem memungkinkan pengelolaan transaksi menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Meskipun masih terdapat kendala teknis dan kebutuhan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara umum telah berperan positif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari.

5. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi dalam penyusunan pelaporan keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari telah berjalan dengan baik, mengikuti peraturan yang berlaku, yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Proses pengelolaan keuangan melibatkan tahapan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta akuntansi dan pelaporan, yang seluruhnya didukung oleh aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi dan mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti perubahan sistem aplikasi, keterbatasan teknologi, serta kurangnya pelatihan SDM. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM, penguatan teknologi, dan pengawasan internal menjadi langkah penting untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari

KPU Kota Kendari diharapkan dapat berfokus pada peningkatan kualitas berupa teknologi dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki agar ditahun selanjutnya pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari lebih dapat beradaptasi lagi dengan perkembangan teknologi yang dimana akan selalu ada perubahan dalam sistem keuangan negara.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti kualitas sistem, efektivitas penggunaan aplikasi SAKTI, serta kompetensi sumber daya manusia, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai sistem informasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Peneliti juga dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda atau pendekatan kuantitatif untuk memperkuat hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Se-Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136-147.
- Arum, A. P., Akuntansi, P., Negeri, U., Nugroho, M. A., Pengajar, S., Pendidikan, J., Universitas, A., & Yogyakarta, N. (2017). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Berbasis Web Pada Batik Pramanca. *Jurnal Nominal*, VI.
- Handayani, P. W. (2012). *Sistem Informasi Manajemen dan Organisasi*. Universitas Indonesia

Press.

- Hilmawan, D. (2012). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi*. Graha Ilmu.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Lestari, W., Alvina, Y., Fatika, C. S., & Riza, A. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan PT WYCA Dengan Metode PIECES. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(2), 153. <https://doi.org/10.30659/jai.12.2.153-164>
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Pusaka Almailda.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Nasution, I. J., Br Purba, R., & Maisyarah, R. (2024). Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Kementerian Agama Kota Binjai. *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, 2(4), 454-468. <https://doi.org/10.55047/jekombital.v2i4.663>
- Puspitawati, lilis dan Anggadini, S, D. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*. Graha Ilmu.
- Rahman S, Hartanto S, H. A. (2023). Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) dalam Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 3(1), 64-72.
- Romney, M. B. and P. J. S. (2015). *Accounting Information Systems*. Salemba Empat.
- Subiyakto, A., Suryadi, K., & Handayani, P. W. (2016). *Model Kesuksesan Sistem Informasi: Kajian Empiris pada Sektor Publik di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- TMBooks. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan aplikasi*. CV. Andi Offset.
- Zahara, & Firdaus, R. (2025). Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Akurasi dan Kecepatan Penyajian Laporan Keuangan. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1, 9423-9432. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Zaimar, F. (2024). *Analisis Laporan Keuangan*. Anak Hebat Indonesia.